

INOVASI KEBIJAKAN SATU DATA UNTUK MEWUJUDKAN *OPEN GOVERMENT DATA* DI INDONESIA: SEBUAH KERANGKA KERJA TEORITIS TERINTEGRASI

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Sains (M.Si)
Pada
Program Studi Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**

oleh :

**MUHAMMAD FIRDAUS FEBRIANSYAH
NIM.07012622327010**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : INOVASI KEBIJAKAN SATU DATA UNTUK MEWUJUDKAN *OPEN GOVERNMENT DATA* DI INDONESIA: SEBUAH KERANGKA KERJA TEORITIS TERINTEGRASI

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FIRDAUS FEBRIANSYAH

NIM : 07012622327010

Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Bidang Kajian Utama : KEBIJAKAN PUBLIK

Menyetujui,

Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM.
Pembimbing Pertama

Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP.
Pembimbing Kedua

Mengetahui,

Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik

Dr. Raniasa Putra, S.I.P., M.Si
NIP. 19780512 200212 1 003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Tesis : INOVASI KEBIJAKAN SATU DATA UNTUK MEWUJUDKAN *OPEN GOVERNMENT DATA* DI INDONESIA: SEBUAH KERANGKA KERJA TEORITIS TERINTEGRASI

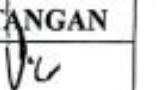
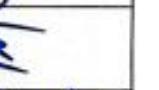
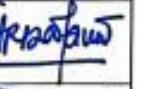
Nama Mahasiswa : Muhammad Firdaus Febriansyah

NIM : 07012622327010

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik

Tanggal Ujian : 9 Desember 2024

| NO. | NAMA DOSEN | TIM PENGUJI | TANDA TANGAN |
|-----|--|-------------|---|
| 1 | Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM. | Ketua |  |
| 2 | Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP. | Sekretaris |  |
| 3 | Dr. Muhammad Abduh, M.Si. | Anggota |  |
| 4 | Dr. Katiriza Imania, M.Si. | Anggota |  |
| 5 | Dr. Raniasa Putra, S.I.P., M.Si. | Anggota |  |

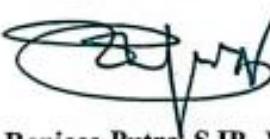
Palembang, Desember 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Alfitri, M.Sc.
NIP. 19660122 199003 1 004

Menyetujui,
Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik



Dr. Raniasa Putra, S.I.P., M.Si.
NIP. 19780512 200212 1 003

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Firdaus Febriansyah
NIM : 07012622327010
Tempat / Tanggal lahir : Desa Karya Maju, 21 Februari 2000
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik
Judul Tesis : INOVASI KEBIJAKAN SATU DATA UNTUK MEWUJUDKAN *OPEN GOVERNMENT DATA* DI INDONESIA: SEBUAH KERANGKA KERJA TEORITIS TERINTEGRASI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, Januari 2025

Yang Menyatakan,



Muhammad Firdaus Febriansyah
NIM. 07012622327010

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Firdaus Febriansyah
NIM : 07012622327010
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik. **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non exclusive Royalty - Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“INOVASI KEBIJAKAN SATU DATA UNTUK MEWUJUDKAN OPEN GOVERNMENT DATA DI INDONESIA: SEBUAH KERANGKA KERJA TEORITIS TERINTEGRASI”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palembang
Pada Tanggal : Januari 2025
Yang Menyatakan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Muhammad Firdaus Febriansyah".

Muhammad Firdaus Febriansyah
NIM. 07012622327010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Inovasi Kebijakan Satu Data untuk Mewujudkan Open Goverment Data di Indonesia: Sebuah Kerangka Kerja Teoritis Terintegrasi**” tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Terkhusus kepada Ayahanda Asan, S.Pd., M.Si. dan Ibunda Masayu Mariamah, S.Pd.** atas segala doa, nasehat, dukungan, serta pengorbanan yang dari segi moral dan material kepada penulis serta kakak Penulis **Muhammad Iqbal Oktavin, S.T.** dan adik Penulis **Siti Syafiyya Salsabila** yang selalu mendoakan, menghibur, menyemangati, dan mendukung Penulis.
2. **Bapak Prof. Dr. Alfritri, M.S.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. **Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya.
4. **Bapak Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM.** selaku dosen pembimbing tesis I yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan kritik, saran, dan bimbingan yang sangat berguna untuk penyusunan tesis ini.
5. **Bapak Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP.** selaku dosen pembimbing tesis II yang juga telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan kritik, saran, dan bimbingan yang sangat berguna untuk penyempurnaan penyusunan tesis ini.
6. **Bapak Dr. Rizki Kartika, S.Psi., M.Si.** selaku rival thinking akademik yang telah memberikan masukan dan semangat bagi saya dalam menjalankan proses penyusunan tesis.
7. **Seluruh pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Magister Administrasi Publik.**

Akhirnya, apa yang penulis dalam pelaksanaan tesis ini maka diharapkan berguna bermanfaat bagi kegiatan akademik, bagi masyarakat umum dalam mengetahui fenomena yang ada, serta dalam penyelesaiannya dengan konsep sektor publik.

Palembang, Januari 2025



Muhammad Firdaus Febrisansyah
NIM. 07012622327010

ABSTRAK

INOVASI KEBIJAKAN SATU DATA UNTUK MEWUJUDKAN *OPEN GOVERMENT DATA* DI INDONESIA: SEBUAH KERANGKA KERJA TEORITIS TERINTEGRASI

Muhammad Firdaus Febriansyah; dibimbing oleh Dr. Ir. Abdul Nadjib M.M. dan Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP. (xxi + 303 halaman, 52 gambar, 25 tabel, 17 lampiran).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana kontribusi inovasi kebijakan Satu Data Indonesia untuk mewujudkan *Open Government Data* di Indonesia, menginvestigasi prinsip-prinsip *Open Government Data* melalui Portal Satu Data Indonesia, serta merangkai dan kerangka kerja teoritis terintegrasi. Untuk mencapai tujuan penelitian, Peneliti mengintegrasikan teori difusi inovasi, teori berbasis sumber daya, dan kriteria keberhasilan inovasi yaitu delapan *prinisp Open Goverment Data*. Metode yang digunakan yaitu kualitatif, dengan sumber data melalui observasi dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis tematik. Hasil penelitian, yaitu kondisi tata kelola data Indonesia yang belum optimal menuntut sebuah inovasi untuk tata kelola data terpadu. Inovasi tersebut yaitu Satu Data Indonesia yang kemudian disalurkan melalui media interpersonal dan media massa. Selanjutnya Penelitian juga menemukan bahwa telah terdapat sumber daya internal yang menjadi penggerak sistem sosial untuk mengadopsi kebijakan Satu Data Indonesia. Namun, hingga saat ini adopsi kebijakan Satu Data Indonesia belum merata ke semua sistem sosial yang disebabkan oleh lemahnya budaya organisasi, walaupun begitu pola kategorisasi adopter kebijakan Satu Data Indonesia telah menunjukkan tren yang sesuai dengan teori difusi inovasi. Selain itu, Peneliti juga merangkai kerangka kerja baru yang dilahirkan berdasarkan kesuksesan dalam mewujudkan *Open Government Data* melalui kebijakan Satu Data Indonesia. Kerangka kerja baru tersebut bernama *Arrow Framework* yang dapat digunakan oleh praktisi sebagai pedoman adopsi inovasi, dan juga dapat digunakan oleh akademisi sebagai pedoman evaluasi adopsi inovasi.

Kata kunci: Satu Data Indonesia; *Open Government Data*; Adopsi Inovasi; Tata Kelola Data.

Mengetahui,

Dr.Ir. Abdul Nadjib, MM.
Pembimbing Pertama

Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP.
Pembimbing Kedua

Menyetujui,

Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik



Dr. Raniasa Putra, S.I.P., M.Si.

NIP: 197805122002121 003

ABSTRACT

INNOVATION OF THE ONE DATA POLICY TO REALIZE OPEN GOVERNMENT DATA IN INDONESIA: AN INTEGRATED THEORETICAL FRAMEWORK

Muhammad Firdaus Febriansyah; supervised by Dr. Ir. Abdul Nadjib M.M. and Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP. (xxi + 303 Pages, 52 pictures, 25 tables, 17 attachments).

This study aims to explore the extent to which the innovation of the Satu Data Indonesia (SDI) policy contributes to the realization of Open Government Data (OGD) in Indonesia, investigate the principles of OGD through the Satu Data Indonesia Portal, and construct an integrated theoretical framework. To achieve these objectives, the researcher integrates the diffusion of innovation theory, resource-based theory, and the criteria for innovation success, namely the eight principles of Open Government Data. The study employs a qualitative method, utilizing data sources from observations and secondary data, which are analyzed using thematic analysis techniques. The findings reveal that Indonesia's data governance remains suboptimal, necessitating an innovation for integrated data governance. This innovation, Satu Data Indonesia, has been disseminated through interpersonal and mass media channels. Furthermore, the study identifies existing internal resources that serve as drivers for social systems to adopt the Satu Data Indonesia policy. However, the adoption of the policy has not been evenly distributed across all social systems due to weak organizational culture. Despite this, the categorization pattern of adopters of the Satu Data Indonesia policy aligns with the trends described in diffusion of innovation theory. Additionally, the researcher develops a new framework, derived from the successful realization of Open Government Data through the Satu Data Indonesia policy. This framework, named the Arrow Framework, can serve as a guide for practitioners in adopting innovations and as a reference for academics in evaluating innovation adoption.

Keywords: One Data Indonesia; Open Government Data; Innovation Adoption; Data Governance.

Approved by,


Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM.
First Advisor


Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP.
Second Advisor

Acknowledged by,

Coordinator of the Master of Public Administration Program


Dr. Raniasa Putra, S.I.P., M.Si.
NIP. 197805122002121 003

RINGKASAN

Lemahnya pembangunan TIK di Indonesia, terbatasnya sumber daya internal, serta rendahnya kemampuan data yang dimiliki organisasi publik untuk menghasilkan data yang berkualitas, berdampak pada masih banyaknya organisasi publik di Indonesia yang belum mampu untuk mengadopsi kebijakan SDI. Kondisi-kondisi dini atas merupakan fenomena yang dapat menghambat optimalisasi tata kelola data yang baik serta menghambat terwujudnya *OGD* di Indonesia. Selain itu adopsi kebijakan SDI oleh organisasi publik di Indonesia belum sepenuhnya terlaksana, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kontribusi kebijakan SDI dalam mewujudkan *OGD* di Indonesia, terutama mengingat tingkat koneksi pemerintah Kabupaten/Kota yang baru mencapai 51 persen. Fenomena ini tentu saja tidak lepas dari tiga permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Untuk itu maka penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengeksplorasi sejauh mana kontribusi inovasi kebijakan SDI untuk mewujudkan *OGD* di Indonesia, menganalisa kontribusi tersebut dalam konteks mewujudkan *OGD* di Indonesia dengan menganalisa Portal SDI dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *OGD*, serta membangun *teoretical framework* berdasarkan kontribusi dari adopsi kebijakan SDI untuk meningkatkan tata kelola data di Indonesia, yang juga sekaligus dapat dijadikan pedoman oleh sistem sosial dalam menerapkan inovasi lainnya,

Teori yang digunakan adalah difusi inovasi dalam organisasi melalui tiga fase utama, yaitu sebelum adopsi, proses difusi, dan proses adopsi. Ketiga fase tersebut disusun berdasarkan teori difusi inovasi dari (Rogers, 2016) yang relevan relevan untuk menjelaskan proses adopsi kebijakan SDI, namun memerlukan pengembangan lebih lanjut dengan mempertimbangkan konteks sosial dan politik Indonesia. Oleh karena itu, teori ini akan diintegrasikan dengan teori berbasis sumber daya yang diadopsi dari jurnal (Zhao et al., 2022) dan prinsip-prinsip *OGD* sebastopol 2007.

Selanjutnya, Peneliti mendesain penelitian melalui jenis penelitian kualitatif, dengan strategi penelitian asrip dan dokumenter. Unit analisis pada penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia mulai dari kementerian dan lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan data

sekunder, yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis tematik untuk dapat menjawab rumusan masalah yang telah di bangun.

Hasil pertama penelitian menunjukan bahwa pada mulanya penerapan tata kelola data di Indonesia belum optimal, dan pada tahun 2014, inisiatif kebijakan satu data Indonesia mulai muncul, namun pada tahun tersebut SDI belum memiliki dasar hukum, hingga pada tahun 2019 Kebijakan SDI baru memilik dasar hukum melalui Peraturan Presiden. Peraturan tersebut memiliki kontribusi yang sangat vital karena SDI menjadi inovasi data terpadu, yang kemudian di salurkan melalui media interpersonal dan media massa. Kebijakan SDI juga berkontribusi dalam memberikan landasan bagi badan publik di Indonesia seperti sumber pendanaan yang berasal dalam APBN/APBD/ lainnya yang sah, memberikan mekanisme pembagian tugas sesuai dengan penataan organisasi, serta memberikan pedoman (dasar hukum) yang kuat. Namun kebijakan SDI tidak dapat berkontribusi secara langsung dalam merubah budaya organisasi publik di Indonesia yang cenderung lambat dalam merespon inovasi. Walaupun begitu, pola kategorisasi adopter memiliki kecenderungan yang sama dengan grafik waktu oleh Rogers. Hal ini tidak lepas dari adopsi inovasi yang telah dilakukan oleh sebagian besar sistem soial. Selanjutnya, **hasil kedua penelitian** juga menunjukan bahwa, portal SDI sebagian besar telah memenuhi prinsip-prinsip *OGD*. Portal SDI terbukti telah memenuh tujuh dari delapani prinsip-prinsip *OGD* dari sebastopol 2007, yaitu lengkap, utama, tepat waktu, mudah di akses, dapat diproses oleh mesin, tidak diskriminatif, dan non-proprietary. Adapun satu prinsip yang belum terpenuhi adalah bebas lisensi, karena Portal SDI masih menggunakan lisensi terbuka artinya semua yang menggunakan data dari Portal SDI harus mencantumkan keterangan sumber data. Terakhir, **hasil ketiga penelitian** berhasil merangkai kerangka kerja teoritis terintegrasi dalam konteks mewujudkan *OGD* di Indonesia. Keranca kerja teoritis terintegrasi tersebut diberi nama “*Arrow Framework for Adoptions and Evaluation Innovations*”. Kerangka tersebut dirangkai dari teori yang digunakan melalui tema-tema yang muncul berdasarkan data yang terkumpul, serta dengan membangun proposisi-proposisi dan terbukti memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterkaitan tersebut terlihat dari visualisasi proposisi dengan menggunakan software atlas.ti.

SUMMARY

The weak development of ICT in Indonesia, limited internal resources, and the low capability of public organizations to produce high-quality data have resulted in many public organizations in Indonesia being unable to adopt SDI (One Data Indonesia) policies. These conditions represent phenomena that hinder the optimization of good data governance and the realization of OGD (Open Government Data) in Indonesia. Moreover, the adoption of SDI policies by public organizations in Indonesia remains incomplete, raising questions about the extent to which SDI policies contribute to achieving OGD in Indonesia, particularly given that the connectivity level of district and city governments has only reached 51%. This phenomenon is closely linked to the three previously mentioned issues.

This research is essential to explore the extent of the contribution of SDI policy innovation in realizing OGD in Indonesia. It aims to analyze this contribution within the context of achieving OGD by examining the SDI Portal based on OGD principles and developing a theoretical framework based on the adoption of SDI policies to enhance data governance in Indonesia. This framework can also serve as a guideline for social systems in implementing other innovations.

The theory used in this research is the diffusion of innovation in organizations, which involves three main phases: pre-adoption, diffusion process, and adoption process. These phases are structured based on Rogers' (2016) diffusion of innovation theory, which is relevant to explaining the adoption process of SDI policies. However, further development is needed to account for Indonesia's social and political context. Therefore, this theory will be integrated with the resource-based theory adopted from Zhao et al. (2022) and the OGD principles outlined in Sebastopol 2007.

The research employs a qualitative approach with archival and documentary research strategies. The unit of analysis includes the Indonesian government at the national level (ministries and agencies), provincial governments, and district/city governments. Data collection techniques involve observation and secondary data, which are then analyzed using thematic analysis to address the research questions.

The first research finding indicates that the initial implementation of data governance in Indonesia was suboptimal. In 2014, the One Data Indonesia policy initiative

*emerged, but it lacked a legal basis until 2019, when the SDI policy was formally established through a Presidential Regulation. This regulation has played a vital role, positioning SDI as an integrated data innovation disseminated through interpersonal and mass media channels. The SDI policy also contributes to providing a foundation for public bodies in Indonesia, such as funding mechanisms sourced from the national or regional budgets (APBN/APBD) or other legitimate sources, task allocation mechanisms aligned with organizational structuring, and robust legal guidelines. However, the SDI policy cannot directly address the organizational culture of public institutions in Indonesia, which tend to be slow in responding to innovation. Nonetheless, the adoption pattern aligns with Rogers' time-based categorization, reflecting the adoption of innovation by most social systems. **The second research finding** reveals that the SDI portal largely adheres to OGD principles. The portal meets seven out of eight OGD principles from Sebastopol 2007: completeness, primacy, timeliness, accessibility, machine-processability, non-discrimination, and non-proprietary nature. However, the principle of "license-free" is not fulfilled, as the SDI portal employs an open license requiring users to attribute the data source. Finally, **the third research finding** successfully develops an integrated theoretical framework within the context of realizing OGD in Indonesia. This integrated theoretical framework, named the "Arrow Framework for Adoptions and Evaluation Innovations," is constructed based on the themes emerging from the collected data and the propositions derived, demonstrating interconnectedness. This interconnectedness is visualized through propositions using Atlas.ti software.*

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN PENGESAHAN TESIS..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| RINGKASAN | ix |
| SUMMARY..... | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | xix |
| RIWAYAT HIDUP..... | xx |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 14 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 14 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 14 |
| 1.5. <i>Knowledge Gap</i> | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 18 |
| 2.1. Penelitian Terdahulu..... | 18 |
| 2.2. Landasan Teori..... | 37 |
| 2.3. Teori yang digunakan..... | 39 |
| 2.4. <i>Theoretical Gap</i> | 53 |
| 2.5. Kerangka Berpikir Teoritis..... | 56 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 60 |
| 3.1. Desain Penelitian | 60 |
| 3.2. Jenis Penelitian..... | 62 |
| 3.3. Strategi Penelitian | 62 |

| | |
|---|------------|
| 3.4. Fokus Penelitian..... | 62 |
| 3.4. Unit Analisis..... | 67 |
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data | 67 |
| 3.6. Teknik Kredibilitas Penelitian..... | 69 |
| 3.7. Teknik Analisis Data | 69 |
| 3.7. Teknik Menampilkan Data..... | 72 |
| 3.8. <i>Methodological Gap</i> | 73 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM UNIT PENELITIAN | 78 |
| 4.1. Pembagian Wilayah Negara | 78 |
| 4.2. Urusan Pemerintahan | 78 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN | 84 |
| 6.1. Hasil | 84 |
| 6.2. Pembahasan..... | 181 |
| BAB VI Penutup..... | 186 |
| 5.1. Kesimpulan | 186 |
| 5.2. Saran..... | 186 |
| 5.3. Keterbatasan Penelitian..... | 187 |
| 5.4. Implikasi Teoritis | 187 |
| 5.5. Implikasi Praktis | 188 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 189 |
| LAMPIRAN..... | 195 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----|
| Gambar 1.1. Fase Open government data Indonesia dan Dunia | 3 |
| Gambar 1.2. Peraturan Open Government Data Berbasis Digital di Indonesia..... | 4 |
| Gambar 1.3. Penyelenggara Kebijakan Satu Data Indonesia | 5 |
| Gambar 1.4. Kedudukan BPS dan Kebijakan SDI dalam mewujudkan OGD di Indonesia | 6 |
| Gambar 1.5. Perbandingan Data Capability dalam Tiga Tahun Terakhir | 8 |
| Gambar 2.1. Trend Publikasi Artikel Open government data..... | 18 |
| Gambar 2.2. Penyebaran Subtema Artikel tentang OGD | 19 |
| Gambar 2.3. Kategori Adopter Inovasi menurut Roger..... | 46 |
| Gambar 2.4. Skema Kategorisasi Sumber Daya dalam RBT | 52 |
| Gambar 2.5. Kerangka berpikir teoritis | 56 |
| Gambar 3.1. Desain penelitian dalam kerangka berpikir teoritis | 61 |
| Gambar 3.2. Proses Sistematik Analisis Tematik: 6 Proses untuk Pengembangan Model Konseptual dalam Penelitian Kualitatif..... | 72 |
| Gambar 5.1. Pidato Presiden Obama dalam Sidang Umum PBB | 84 |
| Gambar 5.2. Open Government Declaration pada 20 September 2011..... | 85 |
| Gambar 5.3. Skor Data Capability Negara Creation dan Co-creation OGP..... | 88 |
| Gambar 5.4. Perwakilan Indonesia dalam pertemuan OGP pada 20 September 2011 | 101 |
| Gambar 5.5. Peluncuran Portal Data Indonesia pada 2014 | 102 |
| Gambar 5.6. Status Portal Data Indonesia | 102 |
| Gambar 5.7. Proses kurasi dataset pada Portal SDI | 103 |
| Gambar 5.8. Skor implementasi dan kualitas birokrasi di Indonesia | 104 |
| Gambar 5.9. Forum SDI Pusat dan Daerah | 107 |
| Gambar 5.10. Pertumbuhan follower media massa SDI | 108 |
| Gambar 5.11. Pertumbuhan postingan dan tweets media massa SDI..... | 109 |
| Gambar 5.12. Jumlah PNS di Indonesia, 2024 | 110 |
| Gambar 5.13. Indeks literasi digital berdasarkan segmentasi, 2022 | 112 |
| Gambar 5.14. Sumber pendanaan kebijakan SDI | 113 |
| Gambar 5.15. Struktur penyelenggaraan SDI tingkat pusat dan daerah..... | 115 |
| Gambar 5.16. Dewan pengarah dan pembina data SDI..... | 116 |
| Gambar 5.17. Sekretariat SDI tingkat pusat | 117 |
| Gambar 5.18. Coordination score badan publik di Indonesia | 124 |
| Gambar 5.19. Pengelompokan DOI adopters category | 128 |
| Gambar 5.20. Sistem sosial (Pemerintah Provinsi) yang telah mengadopsi dan terintegrasi dengan portal SDI | 130 |
| Gambar 5.21. Sistem sosial (Pemerintah Kabupaten) yang telah mengadopsi dan terintegrasi dengan portal SDI | 131 |
| Gambar 5.22. Sistem sosial (Pemerintah Kota) yang telah mengadopsi dan terintegrasi dengan portal SDI | 132 |
| Gambar 5.23. Alur registrasi untuk akses login..... | 138 |
| Gambar 5.24. Jenis-jenis format dataset Portal SDI..... | 139 |

| | |
|---|-----|
| Gambar 5.25. Tanggal harvesting data dari berbagai portal badan publik | 140 |
| Gambar 5.26. Kemudahan akses dalam mencari dataset..... | 141 |
| Gambar 5.27. Pencarian datset melalui proses fitur pencarian..... | 142 |
| Gambar 5.28. Pengunduhan dataset tanpa pendaftaran..... | 143 |
| Gambar 5.29. Lisensi data pada Portal SDI..... | 145 |
| Gambar 5.30. Lisensi data dalam Portal SDI | 146 |
| Gambar 5.31. Tittle II (OGD ACT) Negara Amerika Serikat | 147 |
| Gambar 5.32. Visualisasi proposisi satu | 168 |
| Gambar 5.33. Visualisasi proposisi dua..... | 169 |
| Gambar 5.34. Visualisasi proposisi tiga | 169 |
| Gambar 5.35. Visualisasi proposisi empat..... | 170 |
| Gambar 5.36. Visualisasi proposisi lima | 171 |
| Gambar 5.37. Visualisasi proposisi enam..... | 171 |
| Gambar 5.38. Visualisasi proposisi tujuh | 172 |
| Gambar 5.39. Arrow Framework for Adoptions and Evaluation Innovations..... | 173 |
| Gambar 5.40. Kerangka hasil penelitian | 180 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 1.1. Indeks dan Subindeks Pembangunan TIK Indonesia, 2021-2022 | 7 |
| Tabel 1.2. Organisasi publik yang telah terkoenksi dengan Portal SDI | 9 |
| Tabel 1.3. Hambatan dan Dukungan dalam Implementasi Kebijakan OGD | 10 |
| Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu | 20 |
| Tabel 2.2. Penelitian terdahulu berdasarkan aspek teori | 54 |
| Tabel 3.1. Desain Penelitian | 60 |
| Tabel 3.2. Fokus Penelitian..... | 63 |
| Tabel 3.3. Unit Analisis Penelitian | 67 |
| Tabel 3.4. Penelitian Terdahulu Berdasarkan Aspek Metode dan Lokasi Penelitian | 75 |
| Tabel 5.1. Profil Portal OGD dari 10 Negara di Seluruh Dunia..... | 86 |
| Tabel 5.2. Dasar hukum Open Government negara pendiri OGP | 89 |
| Tabel 5.3. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan OGD | 96 |
| Tabel 5.4. Media massa SDI..... | 107 |
| Tabel 5.5. Rencana aksi nasional dalam mewujudkan Open Government di Indonesia | 118 |
| Tabel 5.6. Pelaksanaan komitmen awal SDI | 120 |
| Tabel 5.7. Perbandingan capaian Presiden RI terkait Open government data..... | 122 |
| Tabel 5.8. Kategori adopter SDI dari tiga level pemerintahan di Indonesia | 126 |
| Tabel 5.9. 353 unit analisis yang terkoneksi Portal SDI..... | 129 |
| Tabel 5.10. Kontribusi kebijakan SDI untuk mewujudkan OGD di Indonesia | 133 |
| Tabel 5.11. Datasets berdasarkan topik data..... | 135 |
| Tabel 5.12. Dataset berdasarkan level pemerintahan | 137 |
| Tabel 5.13. Status format data berdasarkan jenis data..... | 143 |
| Tabel 5.14. Ringkasan Portal SDI berdasarkan prinsip-prinsip OGD..... | 148 |
| Tabel 5.15. Step 1 - 4 analisis tematik berdasarkan hasil penelitian | 149 |
| Tabel 5.16. Petunjuk penggunaan Arrow Framework | 177 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 1. Profil Kebijakan SDI dari 63 Instansi Pemerintah Pusat Negara Indonesia | 196 |
| Lampiran 2. Profil Kebijakan SDI di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia..... | 206 |
| Lampiran 3. Kontribusi pemerintah pusat yang terkoneksi portal SDI terhadap rilis datasets | 276 |
| Lampiran 4. Kontribusi pemerintah provinsi yang terkoneksi portal SDI terhadap rilis datasets | 281 |
| Lampiran 5. Kontribusi pemerintah kabupaten/kota yang terkoneksi portal SDI terhadap rilis datasets | 283 |
| Lampiran 6. SK Pembimbing..... | 296 |
| Lampiran 7. Draft Konsultasi Proposal Penelitian dengan Dosen Pembimbing 1. | 297 |
| Lampiran 8. Draft Konsultasi Proposal Penelitian dengan Dosen Pembimbing 2. | 298 |
| Lampiran 9. Matriks Perbaikan Seminar Proposal..... | 299 |
| Lampiran 10. Draft Konsultasi Hasil Penelitian dengan Dosen Pembimbing 1 | 301 |
| Lampiran 11. Draft Konsultasi Hasil Penelitian dengan Dosen Pembimbing 2 | 302 |
| Lampiran 12. Matriks Perbaikan Seminar Hasil Penelitian | 303 |
| Lampiran 13. Draft Konsultasi Akhir dengan Dosen Pembimbing 1 | 305 |
| Lampiran 14. Draft Konsultasi Akhir dengan Dosen Pembimbing 2 | 306 |
| Lampiran 15. Matriks Perbaikan Ujian Tesis | 307 |
| Lampiran 16. Bukti Memperbaiki Tesis Hasil Ujian..... | 309 |
| Lampiran 17. Hasil Plagiarism Checker..... | 310 |

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini di persembahkan untuk:

1. **Ayah dan Ibu Penulis** (*Asan, S.Pd., M.Si. dan Masayu Mariamah, S.Pd.*) sebagai motivasi dalam hidup yang selalu mendukung dari segi moral dan material;
2. **Kakak dan Adik Penulis** (*Muhammad Iqbal Oktavin, S.T., Siti Syafiyya Salsabila, dan Momoy*) yang selalu memberi semangat, dukungan, dan senyuman;
3. **Rekan-rekan Program Studi Magister Administrasi Publik Angkatan 2022 Genap**;
4. **Almamater Kebanggaan**;
5. **Apresiasi diri Penulis sendiri.**

“Kalau ingin melakukan perubahan jangan tunduk terhadap kenyataan, asalkan kau yakin di jalan yang benar maka lanjutkan”
(Gus Dur)

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Firdaus Febriansyah, lahir di Desa Karya Maju pada tanggal 21 Februari 2000, dengan latar belakang pendidikan di bidang Administrasi. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 2 Karya Maju pada tahun 2013, pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Keluang pada tahun 2015, dan pendidikan menengah atas di SMAS LTI IGM Palembang dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam pada tahun 2018.



Pendidikan tinggi ditempuh di Universitas Sriwijaya dengan jurusan S1- Ilmu Administrasi Publik dan lulus pada tahun 2022. Berdomisili di Jl. Sanjaya RT/RW 06/02, Kelurahan Alang-alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan, dengan kode pos 30154. Informasi kontak yang dapat dihubungi adalah email m.firdaus3150.mf@gmail.com dan nomor telepon 082269055916.

Memiliki pengalaman kerja yang signifikan, di antaranya sebagai Asistensi Tim Akreditasi Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, pada tahun 2023 hingga 2024. Tugas yang dilaksanakan mencakup penyusunan laporan evaluasi diri terkait pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, berperan sebagai Asisten Tim Ahli RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2045 dengan tanggung jawab utama menyusun dokumen bagian BAB 2 mengenai Gambaran Umum Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2024, turut menjadi Asistensi Tim Ahli Legislatif Kabupaten Musi Banyuasin dalam kajian bertema “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Optimalisasi Retribusi Batubara (Kajian Analisis Terhadap LKPJ APBD 2023 Pj. Bupati Musi Banyuasin)” serta mereview Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun yang sama, juga menjadi bagian dari Tim inti FISIP UNSRI dalam penyusunan studi kelayakan pembukaan cabang baru Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim di Kota Prabumulih. Selanjutnya, pada awal tahun 2025, juga menjadi bagian dari Tim Ahli FISIP Universitas Sriwijaya dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029, bagian BAB 5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah terpilih.

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|---------------|---|
| APBD | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| APBN | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional |
| BAPPENAS | : Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional |
| BPS | : Badan Pusat Statistik |
| <i>CAQDAS</i> | : <i>Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software</i> |
| <i>ODI</i> | : <i>One Data Indonesia</i> |
| <i>OGD</i> | : <i>Open government data</i> |
| <i>OGI</i> | : <i>Open Government Indonesia</i> |
| <i>OGP</i> | : <i>Open Government Partnership</i> |
| PBB | : Perserikan Bangsa-Bangsa |
| PDN | : Pusat Data Nasional |
| <i>SDG's</i> | : <i>Sustainable Development Goals</i> |
| SDI | : Satu Data Indonesia |
| SDM | : Sumber Daya Manusia |
| SPBE | : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
| TIK | : Teknologi Informasi dan Komunikasi |

DAFTAR PUSTAKA

- Aarshi, S., Malik, B. H., Habib, F., Ashfaq, K., Saleem, I., & Tariq, U. (2018). Dimensions of open government data web portals: A case of Asian countries. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 9(6), 459–469. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2018.090663>
- ACSH. (2022). *Open [Government] Data Policies and Practices: Select Country Cases* (Astana (ed.)). Astana Civil Service Hub.
- Altayar, M. S. (2018). Motivations for open data adoption: An institutional theory perspective. *Government Information Quarterly*, 35(4), 633–643. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.09.006>
- Amelia, R., & Rahayu, A. S. Y. (2023). ANALYSIS OF INDONESIA'S ONE DATA POLICY IMPLEMENTATION: THE ROLE OF THE CENTRAL STATISTICS AGENCY AS A STATISTICAL DATA COACH. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 708–719. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3115>
- Ardani, I., & Cahyani, H. S. H. (2022). Tantangan Kebijakan Satu Data Indonesia: Studi Kasus Pada Sistem Pencatatan Kematian dan Penyebab Kematian di DKI Jakarta. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 25(1), 52–60. <https://doi.org/10.22435/hsr.v25i1.4167>
- Azizah, Y., & Permana, I. (2024). Upaya Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 7. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.173>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2022*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Bernot, A., Tjondronegoro, D., Rifai, B., Hasan, R., Liew, A. W. C., Verhelst, T., & Tiwari, M. (2024). Institutional Dimensions in Open Government Data: A Deep Dive Into Indonesia's Satu Data Initiative and Its Implications for Developing Countries. *Public Performance and Management Review*, 0(0), 1–31. <https://doi.org/10.1080/15309576.2024.2377609>
- Chandler. (2023). *Chandler Good Government Index 2023*.
- Chatfield, A. T., & Reddick, C. G. (2017). A longitudinal cross-sector analysis of open data portal service capability: The case of Australian local governments. *Government Information Quarterly*, 34(2), 231–243. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.02.004>
- Chatfield, A. T., & Reddick, C. G. (2018). The role of policy entrepreneurs in open government data policy innovation diffusion: An analysis of Australian Federal and State Governments. *Government Information Quarterly*, 35(1), 123–134. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.10.004>
- Chu, P. Y., & Tseng, H. L. (2016). A Theoretical Framework for Evaluating Government Open Data Platform. *ACM International Conference Proceeding Series*, 135–142. <https://doi.org/10.1145/3014087.3014099>
- Digitalisation and Public Governance, M. (2024). *Fifth Norwegian Action Plan Open Government Partnership (OGP) 2024-2027*.
- Doktoralina, C. M. (2023). Optimasi Konsep Satu Data Arsitektur Digital: Suatu Kerangka Konsep Analisis Ketahanan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(3), 202–210. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i3.480>
- Fan, B., & Zhao, Y. (2017). The moderating effect of external pressure on the relationship between internal organizational factors and the quality of open

- government data. *Government Information Quarterly*, 34(3), 396–405. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.08.006>
- Febriansyah, M. F., Slamet, W., & Budiarto, G. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA DALAM MENYEDIAKAN BASIS DATA YANG AKURAT DAN TRANSPARAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan) SKRIPSI*. Universitas Sriwijaya.
- Fuchuan, M., Xiaojuana, Z., & Cuicuib, F. (2023). Improving Open Government Data Performance of Local Governments: A Configurational Analysis Based on TOE Framework. *Journal of Integrated Design and Process Science*, 1–26.
- Gozali, A. A., Romadhony, A., & Subaveerapandiyan, A. (2023). One Data Indonesia Policy Adoption for Telkom University Data Warehouse Framework. *Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, 9(2), 160–176. <https://doi.org/10.26594/register.v9i2.3473>
- Haini, S. I., Rahim, N. Z. A., & Zainuddin, N. M. M. (2019). Adoption of open government data in local government context: Conceptual model development. *ACM International Conference Proceeding Series, Part F1482*, 193–198. <https://doi.org/10.1145/3323933.3324092>
- Ham, J., Koo, Y., & Lee, J. N. (2019). Provision and usage of open government data: strategic transformation paths. *Industrial Management and Data Systems*, 119(8), 1841–1858. <https://doi.org/10.1108/IMDS-04-2019-0218>
- Hossain, M. A., & Chan, C. (2015). Open data adoption in Australian government agencies: An exploratory study. *ACIS 2015 Proceedings - 26th Australasian Conference on Information Systems, Mazumder 2014*.
- Imania, K., Suwitra, S., Warella, Y., & Senih, N. (2020). The process of innovation diffusion and adoption of innovations in the implementation of community-based total Sanitation policy in south Sumatera. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 11(1), 81–90. [https://doi.org/10.14505/jemt.v11.1\(41\).10](https://doi.org/10.14505/jemt.v11.1(41).10)
- Indrajit, A. (2018). One Data Indonesia to Support the Implementation of Open Data in Indonesia. In *Information Technology and Law Series IT&LAW 30 Open Data Exposed* (pp. 247–267). Asser Press. <http://www.springer.com/series/8857>
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs) One Data Indonesia Implementation: Challenges and Critical Success Factors. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi Dan Informatika*, 10(1), 13–23. <https://doi.org/10.31504/komunika.v9i1.3750>
- Karamanou, A., Kalampokis, E., & Tarabanis, K. (2022). Linked Open Government Data to Predict and Explain House Prices: The Case of Scottish Statistics Portal. *Big Data Research*, 30, 100355. <https://doi.org/10.1016/j.bdr.2022.100355>
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep. Teori dan Isu. (Ketiga)*. Gaya Media.
- Kempeneer, S., Pirannejad, A., & Wolswinkel, J. (2023). Open government data from a legal perspective: An AI-driven systematic literature review. *Government Information Quarterly*, 40(3), 101823. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101823>
- Khurshid, M. M., Zakaria, N. H., Rashid, A., Kazmi, R., Shafique, M. N., & Nazir Ahmad, M. (2019). Analyzing diffusion patterns of big open data as policy innovation in public sector. *Computers and Electrical Engineering*, 78, 148–

161. <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2019.07.010>
- Komunikasi dan Informatika, K. (2022). Survei Status Literasi Digital Indonesia 2022. In *Katadata Insight Center*.
- Kurniawan, M. (2023). Integrating One Map Policy into One Data Policy in Pontianak City Government. *Uniplan: Journal of Urban and Regional Planning*, 4(2), 59–76. <https://doi.org/10.26418/uniplan.v4i2.68335>
- Maail, A. G. (2018). Understanding Barriers In The Implementation Of The One Data Policy In Indonesia: Insights From Health Data Journey Modelling. *ITU Journal: ICT Discoveries*, 16(2). https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/journal/S-JOURNAL-ICTF.VOL1-2018-2-P09-PDF-E.pdf
- Marihot, D., Wibowo, A., Triutomo, S., & Widodo, P. (2023). The Implementation Of Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) For Sustainable Development. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(6), 1955–1962. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i6.517>
- Matheus, R., & Janssen, M. (2020). A Systematic Literature Study to Unravel Transparency Enabled by Open Government Data: The Window Theory. *Public Performance and Management Review*, 43(3), 503–534. <https://doi.org/10.1080/15309576.2019.1691025>
- Maulidya, R., & Rozikin, M. (2022). Analisis Retrospektif Kebijakan Satu Data Indonesia. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 273–287. <https://doi.org/10.25157/dak.v9i2.7884>
- Mustapa, M. N., Hamid, S., & Nasaruddin, F. H. M. (2022). Factors influencing open government data post-adoption in the public sector: The perspective of data providers. In *PLoS ONE* (Vol. 17, Issue 11 November). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276860>
- Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., & Ranfagni, S. (2023). A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 1–18. <https://doi.org/10.1177/16094069231205789>
- Nguyen, T. H., Le, X. C., & Vu, T. H. L. (2022). An Extended Technology-Organization-Environment (TOE) Framework for Online Retailing Utilization in Digital Transformation: Empirical Evidence from Vietnam. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(4), 200. <https://doi.org/10.3390/joitmc8040200>
- Nikiforova, A. (2021). Smarter Open Government Data for Society 5 . 0 : Are Your Open Data Smart Enough? *Sensors (Basel, Switzerland)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/s21155204>
- OECD. (2016). Open Government Data Review of Mexico: Data Reuse for Public Sector Impact and Innovation. In *OECD Digital Government Studies*. OECD Publishing. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1787/9789264259270-en>
- OECD. (2018). Open Government Data Report: Enhancing Policy Maturity for Sustainable Impact. *OECD Digital Government Studies*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/9789264305847-en>
- Open data watch. (2022). *Open Data Resource Guide*. 1–10. <http://www.irodat.org/?p=database&c=ES>
- Parung, G. A., Hidayanto, A. N., Sandhyaduhita, P. I., Ulo, K. L. M., & Phusavat, K. (2018). Barriers and strategies of open government data adoption using fuzzy AHP-TOPSIS: A case of Indonesia. *Transforming Government: People*,

- Process and Policy*, 12(3–4), 210–243. <https://doi.org/10.1108/TG-09-2017-0055>
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, Pub. L. No. 39 (2019).
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (2018).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, Pub. L. No. 39, Peraturan Presiden (2019).
- Perencanaan dan Pembangunan Nasional, K. (2016). *Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2016-2017*.
- Riwukore, J. R., Marnisah, L., Habaora, F. H. F., & Yustini, T. (2021). Implementation of One Indonesian Data by the Central Statistics Agency of East Nusa Tenggara Province. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 117–128. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i2.1194>
- Rogers, E. M. (2016). *Diffusion of Innovations* (Five). Free Press.
- Safarov, I. (2019). Institutional Dimensions of Open Government Data Implementation: Evidence from the Netherlands, Sweden, and the UK. *Public Performance and Management Review*, 42(2), 305–328. <https://doi.org/10.1080/15309576.2018.1438296>
- Safarov, I. (2020). Institutional Dimensions of Open Government Data Implementation: Evidence from Transition Countries. *Public Performance and Management Review*, 43(6), 1359–1389. <https://doi.org/10.1080/15309576.2020.1805336>
- Sanjaya, G. Y., Fauziah, K., Pratama, R. A., Fitriani, N. A., Setiawan, M. Y., Fauziah, I. A., Lazuardi, L., Sumarsono, S., Afrizal, S. H., Sibuea, F., & Manullang, E. V. (2024). Improving routine health data in Indonesia: Utilising the WHO data quality tool for Aplikasi Satu Data Kesehatan. *Medical Journal of Malaysia*, 79(2), 176–183.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). Research Methods for Business Students. In *Pearson* (Eighth). Pearson.
- Sipayung, N. N., & Hardjono, R. K. (2024). Asahan One Data Application Innovation (ASADA) in Asahan Regency as a Response to Indonesia's One Data Policy. *Jurnal Impresi Indonesia*, 3(5), 355–359. <https://doi.org/10.58344/jii.v3i5.4853>
- Šlibar, B., & Mu, E. (2022). OGD metadata country portal publishing guidelines compliance: A multi-case study search for completeness and consistency. *Government Information Quarterly*, 39(4). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101756>
- Suryahadi, M. F. (2022). Satu data Indonesia (one Indonesian data) to actualize public information disclosure and efficacious process management in the Mojokerto city government. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(7), 2023. <https://satikomo.mojokertokota.go.id/>.
- Tornatzky, L. G., Fleischer, M., & Chakrabarti, A. K. (1990). The Processes of Technological Innovation. In *Lexington Books*. Lexington Books. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6108-2>
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pub. L. No. 14 (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemerintah

- Daerah (2014).
- UNSD. (2020). Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development. *Work of the Statistical Commission Pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- Wang, H. J., & Lo, J. (2020). Factors Influencing the Adoption of Open Government Data at the Firm Level. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 67(3), 670–682. <https://doi.org/10.1109/TEM.2019.2898107>
- Wang, R., Xu, C. K., & Wu, X. (2024). Open Government Data (OGD) as a catalyst for smart city development: Empirical evidence from Chinese cities. *Government Information Quarterly*, 41(4), 101983. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101983>
- Wang, V., & Shepherd, D. (2020). Exploring the extent of openness of open government data – A critique of open government datasets in the UK. *Government Information Quarterly*, 37(1), 101405. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101405>
- Wojciechowska, M. (2016). *INTANGIBLE ORGANIZATIONAL RESOURCES: Analysis of Resource-Based Theory and The Measurement of Library Effectiveness*. palgrave macmillan. <https://doi.org/10.1057/978-1-37-58123-5>
- Yang, T. M., & Wu, Y. J. (2016). Examining the socio-technical determinants influencing government agencies' open data publication: A study in Taiwan. *Government Information Quarterly*, 33(3), 378–392. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.05.003>
- Yin, K. R. (2016). *Qualitative Research from Start to Finish* (Second Edi). The Guilford Press.
- Yudan, F. F., & Virgy, M. A. (2021). Implementasi Open Government Data oleh Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Transformative*, 7(1), 128–153. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2021.007.01.6>
- Yuniarty, N., Nur, M. A., Syafari, M. R., Jamaluddin, J., & Yunani, A. (2022). Analysis of One Data Policy Implementation in the “Satu Data Hulu Sungai Selatan” to Digitalization and Regional Development (Study on Implementation of Website Portal “Satu Data Hulu Sungai Selatan”). *Saudi Journal of Economics and Finance*, 6(6), 208–217. <https://doi.org/10.36348/sjef.2022.v06i06.003>
- Zhang, A., & Lv, N. (2021). Research on the Impact of Big Data Capabilities on Government's Smart Service Performance: Empirical Evidence from China. *IEEE Access*, 9, 50523–50537. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3056486>
- Zhao, Y., & Fan, B. (2018). Exploring open government data capacity of government agency: Based on the resource-based theory. *Government Information Quarterly*, 35(1), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.01.002>
- Zhao, Y., & Fan, B. (2021). Effect of an agency's resources on the implementation of open government data. *Information and Management*, 58(4), 103465. <https://doi.org/10.1016/j.im.2021.103465>
- Zhao, Y., Liang, Y., Yao, C., & Han, X. (2022). Key factors and generation mechanisms of open government data performance: A mixed methods study in the case of China. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101717. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101717>
- Zulfikar, Z., & Afandi, A. (2023). Visualisasi Data Pada Aplikasi Satu Data Kota

Jambi. *SATUKATA: Jurnal Sains, Teknik Dan Kemasyarakatan*, 1(2), 61–70.